

**FENOMENA GIMIK POLITIK
“WARNA SARI DEMOKRASI PANCASILA”
(SUATU KRITIK SOSIAL)**

Yosep Copertino Apaut
yosepcopertinoapaut@gmail.com
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendana Wangi

ABSTRAK

Tulisan ini dibuat semata-mata untuk melihat fenomena gimik politik yang berkembang saat menjelang pemilu serentak di tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, serta menganalisa konsep dasar demokrasi pancasila yang merupakan kebanggaan bangsa indonesia sehingga dikenal sebagai salah satu bangsa beradab yang sangat demokratis di Dunia. Pada sudut yang lain dari tulisan ini, juga digambarkan tentang demokrasi bangsa yang makin kehilangan arah dari bentuk idealnya yakni demokrasi Pancasila. Banyak faktor yang tentunya mempengaruhi perubahan arah berpolitik dari bangsa ini, sehingga untuk kembali menjadikan bangsa ini tetap eksis dalam jati diri politiknya maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendidikan politik untuk memperkuat pengetahuan masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif fenomenologi, diharapkan artikel ini dapat memberi gambaran nyata tentang isu besar yang dibahas yaitu Fenomena Gimik Politik yang akhir-akhir ini seolah menjadi Warna Sari Demokrasi Pancasila.

Kata Kunci: Demokrasi, Politik, Gimik, Pancasila.

ABSTRACT

This article was written solely to look at the phenomenon of political gimmicks that developed in the lead up to the simultaneous elections on February 14 2024, as well as to analyze the basic concept of Pancasila democracy which is the pride of the Indonesian nation so that it is known as one of the most democratic civilized nations in the world. In another corner of this article, it also describes the nation's democracy which is increasingly losing direction from its ideal form, namely Pancasila democracy. Many factors certainly influence changes in the political direction of this nation, so that to make this nation continue to exist in its political identity, one way that can be done is by conducting political education to strengthen public knowledge. By using qualitative phenomenological methods, it is hoped that this article can provide a real picture of the big issue discussed, namely the Political Gimik Phenomenon which recently seems to be the color of the Essence of Pancasila Democracy.

Keywords: Democracy, Politics, Gimmick, Pancasila.

PENDAHULUAN

Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati tanggal pemungutan suara Pemilu 2024 serentak se Indonesia Yang akan digelar Rabu, 14 Februari 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) Hasyim Asy'ari resmi membuka peluncuran tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 ditandai dengan menekan tombol sirine, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 yang lalu. Pencarian sosok negarawan yang loyal untuk menjalankan amanah rakyat pun dimulai. Pencarian itu menjadi pekerjaan rumah bagi semua masyarakat bangsa ini untuk menentukan pilihan tepat kepada sosok pemimpin yang tepat pula.

Berbicara tentang sosok pemimpin, Idealnya seorang pemimpin, secara garis besar wajib lulus verifikasi oleh rakyat yang antara lain, matang secara emosional dan politik,

loyal, pemerhati ulung, penolong rakyat, serta berjiwa demokrasi sejati. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa. Demokrasi di Indonesia mengalami dinamika yang cukup kompleks dan menjalani perkembangan yang sangat dinamis. Tercatat dalam sejarah bahwa bangsa ini menjadi bangsa beradab yang diakui dunia sebagai bangsa yang sangat demokratis dalam hal pencarian langsung sosok penting pemimpin yang berjiwa nasionalis, yang telah dibuktikan dalam beberapa kali PILPRES dan PEMILUKADA yang secara keseluruhan tergolong aman, meskipun terdapat beberapa persoalan yang juga berakhir pada penyelesaian yang relatif baik.

secara umum demokrasi dapat digambarkan sebagai bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi Indonesia dipandang perlu dan harus sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Karena alasan kebebasan dan kesetaraan itulah, kemudian setiap warga negara pun bebas untuk memilih termasuk dipilih untuk menjadi apapun dalam proses pemilu, baik sebagai Presiden dan wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Dengan kata lain, negara telah memberikan ruang yang bebas bagi setiap warga negaranya untuk ikut terlibat dalam setiap proses demokrasi bangsa ini. Kebebasan itupun diikuti dengan batasan yang rasional tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam perhelatan politik.

Pencitraan Politik menjadi sesuatu yang biasa dalam dunia demokrasi. Banyaknya drama, trik dan intrik politik pun menghiasi panggung konstestasi menjelang pesta rakyat ini. Seperti jamur yang tumbuh subur dimusim hujan, sekian banyak orang akan dengan konsisten melakukan pencitraan politik guna menarik simpati konstituen untuk memilihnya pada saat proses pemungutan suara nantinya.

METODE

Beranjak dari gambaran singkat diatas, maka penelitian ini diarahkan untuk menggunakan metode kualitatif fenomenologi yang artinya peneliti membaca situasi riil politik dan dinamikanya demokrasi indonesia saat ini sebagai suatu fenomena yang terjadi dengan segala alasan sebab musababnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Demokrasi di Indonesia dari Masa ke Masa.

Ada empat perkembangan demokrasi dari masa ke masa. Berikut penjelasannya:

a) Demokrasi Parlementer (1945 - 1959)

Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Sistem demokrasi ini menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Akan tetapi, konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia karena lemahnya budaya demokrasi pada saat itu untuk mempraktikkan demokrasi model barat .

Pada masa ini pula digelar Pemilu pertama pada 1955. Pemilu 1955 mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan. Beberapa hal yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi

secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya.

b) Demokrasi Terpimpin (1959 - 1965)

Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan, di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi yakni Presiden Sukarno. Di lain sisi, demokrasi terpimpin juga terlihat dari pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) di politik Indonesia.

Pada masa demokrasi terpimpin banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, seperti: Pembentukan Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom), Tap MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, Pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden, Pengangkatan ketua DPR Gotong Royong/MPRS menjadi menteri negara oleh presiden, GBHN yang bersumber pada pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita' ditetapkan oleh DPA bukan MPRS

c) Demokrasi Pancasila era Orde Baru (1965 – 1998).

Setelah peristiwa G30S PKI terjadi di tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menuju Soeharto. Era orde baru ini juga dikenal dengan istilah Demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. Akan tetapi, rezim yang berkuasa selama 32 tahun juga dihantui dengan beberapa penyimpangan, seperti:

- Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil.
- Penegakan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Kekuasaan kehakiman (Yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen kehakiman.
- Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat.
- Sistem kepartaian yang otonom dan berat sebelah.
- Maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

d) Demokrasi Reformasi (1998 - sekarang)

Berakhirnya rezim orde baru yang berkuasa selama 32 tahun melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Era reformasi adalah fase demokrasi yang kembali ke prinsip dasar demokrasi, seperti:

- Adanya Pemilu secara langsung
- Kebebasan Pers
- Desentralisasi.
- Hak-hak dasar warga negara lebih terjamin.
- Rekrutmen politik yang inklusif.

2. Dimensi demokrasi pancasila yang Ideal.

Demokrasi Pancasila di gambarkan sebagai bentuk demokrasi ideal ala Indonesia dengan Bingkai kebhinekaan menjadi syarat mutlak pelaksanaannya . Keikut sertaan masyarakat dalam menentukan arah bangsa menjadi prioritas utama untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang berbasis kedaulatan rakyat. Berbicara tentang negara, Santo. Agustinus dalam bukunya “De Civitate Dei” menggambarkan tentang 2 bentuk

negara yang ideal yakni “Civitas Terrena” dan “Civitas Dei” yang mana masing-masing digambarkan sebagai negara dengan konsep duniawi (Civitas Terrena), dan sebaliknya negara dengan konsep ketuhanan (Civitas Dei) . Indonesia secara tidak langsung berada di antara dua pusran konsep ini. Landasan rasionalnya adalah bahwa Indonesia pasca orde baru memasuki suatu era pembaharuan dengan semakin meningkatnya keikutsertaan rakyat dalam setiap kebijakan publik, termasuk hal politik. Gambaran sederhana tentang upaya mencapai puncak tertinggi dari suatu negara yang kendatipun dipimpin oleh pemimpin konsep duniawi ala Civitas Terrena akan tetapi tetap memandang jauh pada arah perubahan yang bersumber dari konsep keilahian serta memandang nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar.

Bertalian dengannya, Frans Magnis Suseno menjelaskan bahwa politik dipandang sebagai strategi dalam memperjuangkan tata tertib sosial untuk menjadi nilai hidup yang sesuai dengan martabat manusia . Salah satu bentuk kritiknya adalah bahwa Indonesia secara politik memang berupaya untuk mencapai kebaikan umum (bonum commune) akan tetapi politik olehnya masih dianggap sebagai “bisnis kotor” manakala para elit yang berpolitik hanya berupaya untuk memperkaya diri dan mempertahankan gaya demokrasi elit/dinasti. Mestinya dalam hal politik yang demokratis haruslah mengedepankan tujuan akhir yang luhur dengan cara elegan dan bermartabat tinggi demi mencapai “Solus Populi Suprema Lex” (kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang tidak lain merupakan hukum tertinggi) .

Dalam politik praktis, demokrasi Pancasila yang sejati tidak hanya sekedar mengikutsertakan masyarakat untuk memilih pemimpin baginya, akan tetapi lebih dari pada itu, demokrasi Pancasila patut dimaknai sebagai bentuk kebebasan masyarakat untuk memilih sesuai dengan hati nurani, tanpa paksaan, tanpa embel-embel tentu juga tanpa ketakutan semu. Selain daripada itu, kebiasaan lama seperti aksi politik uang (Money Politik) serta praktek kontrak politik yang selalu menjadi gaya berpolitik para elit untuk menakut-nakuti rakyat mestinya tidak terjadi pada momen Rabu, 14 Februari 2024 yang lalu. Alasan yang paling mendasar untuk melakukan penolakan terhadap aksi ini adalah bahwa mental patriotis serta kepercayaan diri yang cukup dalam pertarungan politik harus menjadi modal awal di samping dukungan partai politik dan simpatisan.

Kekuatan politik yang seperti inilah yang akan mencerminkan ideologi demokrasi Pancasila, karena pelaksanaan demokrasi Pancasila yang baik, selain akan berdampak pada proses dan hasil yang baik, juga akan mencerminkan budaya tertib hukum. Terhadap persoalan politik, demokrasi harus tetap menjadi ukuran yang baku dalam perilaku berpolitik, alasan sederhananya karena esensi awal dari kata politik menurut Aristoteles adalah seni dalam mengatur dan mengurus negara juga termasuk ilmu kenegaraan. Esensi politik inilah yang mestinya diilhami sebagai suatu kebijaksanaan atau tindakan turut serta mengambil bagian dalam urusan kenegaraan atau pemerintahan termasuk penetapan bentuk, tugas, dan lingkup urusan negara.

Tujuan akhir dari apa yang dicita-citakan bangsa Indonesia saat ini adalah mencari sosok negarawan yang tangguh, mampu menjadi bapak, terampil untuk mengambil inisiatif, mampu menentukan langkah, sekaligus contoh hidup bagi setiap rakyat yang dipimpinnya, seorang yang mampu memainkan instrumen-instrumen politik dengan arif, tanpa kekerasan, tekanan, tipuan, manipulasi dan keangkuhan. Bagi masyarakat umum, tentunya momentum Rabu, 14 Februari 2024 yang lalu harusnya menjadi hari kedaulatan rakyat, dimana rakyat akan menentukan sikap untuk memilih tokoh tepat tanpa reputasi sebagai “tukang tipu”, yang selalu peduli, yang selalu terbuka mata dan hatinya untuk rakyat.

Karena itu Masyarakat mestinya lebih sebab momentum Pemilu ini juga akan sangat berakibat pada proses panjang perjalanan bangsa 5 tahun mendatang menuju terang yang

sesungguhnya. Suatu terang dimana hukum harus selalu ditegakan, keadilan menjadi hal yang tanpa ada tawaran, demokrasi tanpa ketakutan, moral menjadi pengikat semangat perjuangan, pendidikan menjadi suatu keharusan, kesehatan menjadi kewajiban, kesejahteraan bukan sekedar topik perbincangan hangat para elit bangsa, kemiskinan dan kekeringan menjadi prioritas utama dalam pekerjaan sebagai pemimpin, sebab “sumber air su dekat” sejauh ini hanya sebatas slogan dan retorika politik untuk menutup fakta yang sesungguhnya bahwa “sumber air masi sangat jauh”.

3. Fenomena Gimik Politik Menuju Pemilu Serentak 2024.

Kehidupan bernegara yang saat ini memasuki era milenial dan dirupsi, menjadikan warga negara harus memiliki prinsip – prinsip utama dalam menjaga kedaulatan negara. Semakin mudahnya akses informasi, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, dipandang sebagai sebuah konsensus yang dapat memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Saat ini yang rawan menjadi penggiringan opini publik, penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian adalah hal – hal yang terkait dengan keberagaman dan perbedaan masyarakat di Indonesia. Begitu mudahnya para penyebar hoax menimbulkan perpecahan, sehingga saat ini masyarakat lebih beresiko untuk menghadapi permasalahan – permasalahan yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal ini disebabkan oleh bercampurnya masyarakat yang memiliki latar belakang bermacam – macam pada satu wilayah pemukiman , dimana mereka memiliki tuntutan dalam hal ekonomi dan pekerjaan. Perkumpulan pemukiman ini, disatu sisi mempermudah seseorang untuk bersikap toleransi. Akan tetapi juga menciptakan sebuah konsensus baru, seperti halnya gaya hidup yang berubah, mengasimilasikan budaya asing dengan budaya lokal, serta memiliki orientasi kehidupan yang semakin berkemajuan.

Bertalian dengan keadaan sosial kemasyarakatan yang mengalami perubahan pesat di abad ini, Rakyat Indonesia pun harus dihadapkan dengan agenda Politik dan demokrasi bangsa yaitu pemilihan Umum (PEMILU) yang telah digelar serentak pada Rabu, 14 Februari 2024. Pada satu titik, agenda ini menjadi semacam Uforia demokrasi yang terjadwal untuk mempertegas status sebagai bangsa yang demokratis. Namun, pada sisi yang lain dinamika perpolitikan bangsa ini sedang berada pada titik terendah, dimana terdapat banyak sekali trik dan intrik yang boleh disebut sebagai gimmik politik yang seakan menganggangi identitas kebhinekaan. Terlihat jelas dengan mata telanjang, banyaknya gimik politik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini.

Kata Gimik yang dalam bahasa Inggris disebut gimmick), sesungguhnya merupakan salah satu istilah dalam seni pertunjukan yang berarti, seni gerak tipu tubuh. Tujuannya menciptakan suasana, citra, pengelabuan, efek kejutan hingga demi meyakinkan penonton. Gimik adalah sebuah keniscayaan dalam panggung artis dan entertainment. Nyaris setiap hari, dunia sosialita dan artis dipenuhi gimik demi rating, banjir job hingga eksistensi diri dan sekarang merambah sosial media, khususnya di platform Instagram dan Twitter, Facebook, Youtube, dan lain sejenisnya.

Ironisnya, menjelang pemilu kemarin banyak oknum calon kepala daerah, calon legislator, bahkan tim pemenang dari paket capres dan cawapres dari parpol tertentu yang alih-alih tawarkan konsep dan paparkan program kedepan, malah lebih memilih ber-gimik ria demi meraup suara masyarakat, menaikkan citra mereka dimata masyarakat. Sebagai contoh, Ada oknum tertentu yang dulunya tak pernah bergaul di masyarakat akar rumput, tiba-tiba secara terang-terangan menjadi "orang biasa" agar terlihat merakyat dan "aspiratif", meskipun saat turun ditengah masyarakat si Oknum tetap menjinjing tas branded terbaru atau mengenakan sepatu merk ternama.

Adapun oknum politikus yang ber-gimik dengan melakukan agenda sosial yang diseting sedemikian rupa agar muncul suasana haru-biru dan simpati mendalam. Semisal,

mendadak muncul ditengah banjir atau menyambangi rumah warga yang kesusahan. Pola gimmick seperti ini akan semakin jelas terbaca saat dipublikasikan secara besar-besaran melalui melalui sosial media maupun lewat media massa. Semakin telanjang terbaca saat judul yang diberikan teramat bombastis. Misalnya; "ribuan masyarakat merasa terharu dengan bantuan caleg A" atau "isak tangis penuh suasana RT saat caleg B datang".

Ada juga bentuk gimik politik dalam bentuk Verbal dengan kata atau kalimat yang bernuansa heroik dan bombastis. Seperti; "caleg A mendengarkan sepenuh jiwa" atau "jujur, sehat, merakyat, tepati janji" serta bahasa teks bombastis lainnya yang pada intinya menarik atensi dari publik. Ada pula yang menggunakan gimik visual dalam bentuk baliho dengan sederet kalimat janji

Situasi ini diperparah dengan gimik yang seakan meniscayakan kesamaan semata, yang artinya bahwa Perbedaan Pendapat dan perbedaan pilihan menjadi ancaman bagi pihak lain. Ada juga praktek politik identitas yang tumbuh subur bahkan menjadi trend dalam kampanye pemenangan sosok tertentu. Kalimat dengan tendensi SARA menjadi senjata utama untuk menghancurkan kebebasan warga negara dalam hal memilih dan dipilih yang nota bene teramanatkan dalam konstitusi.

Keadaan ini sesungguhnya merupakan bentuk kemunduran demokrasi yang nyata. Ketika negara-negara dalam peradaban yang lain telah mencapai titik tertinggi dari demokrasi yaitu penghormatan penuh atas perbedaan, dan penghargaan atas Hak Asasi manusia dalam pelaksanaannya, sementara Indonesia masi terbelenggu dalam pemikiran demokrasi politik pragmatis sehingga lebih mengedepankan hasil yang entah didapatkan dengan cara yang terhormat atau tidak. Fakta empirik ini yang kemudian muncul kepermukaan yang secara tidak langsung mencoreng martabat demokrasi Pancasila dari bangsa yang terhormat ini.

4. Pendidikan politik sebagai respon dari fenomena Gimik Politik di era demokrasi terbuka.

Sebagai respon positif untuk menanggapi fenomena gimik politik yang marak terjadi dan menggerogoti sendi-sendi kehidupan berdemokrasi bangsa ini, maka salah satu dari sekian banyak solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat pengetahuan politik ala Pancasila dalam pendidikan politik. Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di suatu negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya bahu-membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, keduanya satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat. Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik di suatu negara membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan yang ada di dalamnya. Jelas bahwa hubungan antara keduanya adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menarik perhatian banyak kalangan.

Istilah pendidikan politik dalam Bahasa Inggris sering disamakan dengan istilah *political socialization*. Istilah *political socialization* jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Dengan menggunakan istilah *political socialization* banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah Sosialisasi Politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit.

Menurut **Ramlan Surbakti**, dalam memberikan pengertian tentang pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik sehingga tidak terkesan ambigu dalam memahami arti Pendidikan Politik. **Surbakti** berpendapat bahwa: Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Bagi Subekti, Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan.

Sementara indoktrinasi politik merupakan proses anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

Pendapat di atas secara tersirat menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik. Pendidikan politik mengajarkan masyarakat untuk lebih mengenal sistem politik negaranya. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat.

David Easton dan Jack Dennis dalam bukunya *Children in the Political System* memberikan batasan mengenai political socialization yaitu bahwa "Political socialization is development process which persons acquire orientation and patterns of behaviour". Pendapat di atas mengungkapkan bahwa pendidikan politik adalah suatu bentuk pendidikan yang dijalankan secara terencana dan disengaja baik dalam bentuk formal maupun informal yang mencoba untuk mengajarkan kepada setiap individu agar sikap dan perbuatannya dapat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku secara sosial. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa pendidikan politik tidak hanya mempelajari sikap dan tingkah laku individu. Namun pendidikan politik mencoba untuk mengaitkan sikap dan tingkah laku individu tersebut dengan stabilitas dan eksistensi sistem politik.

Merujuk pada semua pengertian pendidikan politik yang disampaikan oleh beberapa ahli di atas, pada akhirnya yang dimaksud dengan pendidikan politik adalah suatu upaya sadar yang dilakukan antara pemerintah dan para anggota masyarakat secara terencana, sistematis, dan dialogis dalam rangka untuk mempelajari dan menurunkan berbagai konsep, simbol, hal-hal dan norma-norma politik dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Secara sederhana dapat kita ambil dua tujuan utama yang dimiliki oleh pendidikan politik. Pertama, dengan adanya pendidikan politik diharapkan setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan. Kedua, bahwa dengan adanya pendidikan politik setiap individu tidak hanya sekedar tahu saja tapi juga lebih jauh dapat menjadi seorang warga negara yang memiliki kesadaran politik untuk mampu mengemban tanggung jawab yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan kadar partisipasi dalam dunia politik.

5. Peran Pendidikan politik terhadap isu gimik politik yang menimbulkan Konflik dalam perhelatan Demokrasi

menjelang pemilu, Pilpres dan pemilihan serentak di Indonesia, tentu hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah isu konflik yang soyogianya mesti telah diprediksi jauh sebelum proses pemilu, Pilpres dan pemilihan serentak berlangsung. Peran pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Pembelajaran pendidikan politik yang terus berlanjut memang menjadi suatu kebutuhan yang sangat diperlukan mengingat masalah-masalah di bidang politik sangat kompleks, bersegi banyak, dan berubah-ubah.

Permasalahan yang berpotensi memicu konflik akan benar-benar terlihat pada saat tahapan persiapan (mulai dari pendaftaran sampai pada verifikasi calon presiden atau wakil presiden, serta calon kepala daerah oleh KPU). Dalam tahapan ini saja, akan ada banyak potensi konflik mengingat banyaknya regulasi hukum yang tidak benar-benar menguntungkan beberapa pihak, semisal, pegawai negeri sipil yang harus meninggalkan statusnya sebagai Aparat Sipil Negara, manakala mencalonkan diri untuk ikut terlibat dalam proses Pilkada, sementara bagi TNI/POLRI hanya diberikan cuti dari jabatan/status sebagai anggota TNI/POLRI dan baru mengundurkan diri apabila terpilih sebagai kepala

daerah. Tentu massa pendukung yang tidak memiliki dasar pendidikan politik akan mudah untuk disulut amarahnya terkait hal yang mungkin saja dialami oleh jagonya dalam pesta demokrasi yang berlangsung.

Tahapan proses (Pemilihan kepala daera hingga hasil Pemilihan yang diumumkan KPU). Pada tahapan ini, potensi konflik biasanya dipicuh karena perbedaan pendapat, perbedaan ideologi, perbedaan pandangan politik dan tidak menutup kemungkinan perbedaan gaya menarik simpati yang dianggap negatif semisal Money Politic, dan aksi lainnya, yang berujung pada konflik bahkan terkesan kriminal antar massa pendukung. Pada tingkat pasca, pemilu, pilpres serta pilkada (gugat-menggugat karena banyaknya alasan yang melatar belakangi persoalan yang terjadi saat Pemilu). Pasca Pemilu, kecenderungan konflik bahkan aksi kriminal justru dipicuh karena berbagai persoalan yang fariatif, mulai dari DPT yang tidak terdaftar untuk memilih hingga pengelembungan suara yang menguntungkan salah satu pihak.

Tentu ada tata cara dalam kehidupan bernegara, yang secara konstitusional diberikan ruang untuk melakukan upaya hukum demi tercapainya keadilan. Dapat diperkirakan bahwa Kurangnya pengetahuan Politik dan pembelajaran politik dari dari masyarakat akan berpotensi pada aksi kriminal, hingga pada tindakan brutal dan anarkis yang dilakukan massa pendukung salah satu pihak yang merasa dirugikan atau misalnya dicurangi oleh oknum-oknum tertentu.

SIMPULAN

Dari gambaran diatas, argumentasi sederhana sebagai untuk memberikan gambaran positif tentang pendidikan politik untuk menyikapi fenomena gimik politik dalam menghadapi pemilu, Pilpres dan pemilihan serentak yang sehat dan elegan adalah:

- a) masyarakat mesti memaknai pemilu, pilpres serta Pilkada sebagai proses berdemokrasi yaitu dengan berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan untuk memilih dan menentukan kepercayaan terkait pemerintahan yang akan dijalankan, dengan tetap memaknai perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan sebagai dinamika politik dalam proses pencapaian tujuan bangsa yakni kemakmuran rakyat.
- b) Masyarakat harus menjadi ujung tombak terdepan yang secara objektif dan jujur mengawal proses pemilu, Pilpres dan pemilihan serentak demi tercapainya politik yang bersih dan elegan, terlepas dari perbedaan yang ada.
- c) Masyarakat harus memahami bahwa apapun hasil yang dicapai (siapa pun yang terpilih dalam pemilu, pilpres serta Pilkada) merupakan representasi amanah dari masyarakat.
- d) Masyarakat jangan tersulut amarah apabila terjadi pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu, Pilpres dan pemilihan serentak karena negara telah menyediakan ruang terhormat melalui Mahkamah Konstitusi (MK) bagi setiap orang/ kelompok orang (partai/ team sukses) untuk menyalurkan keberatan manakala terjadi pelanggaran dalam pesta demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeng Muchtar Ghazali and Abdul Majid, 2016, "PPKn: materi kuliah di perguruan tinggi Islam", Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Andrew Heywood dalam Budiardjo Miriam. 2007. "Dasar-Dasar Ilmu Politik". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Basri Seta. 2011. "Pengantar Ilmu Politik". Jogjakarta: Indie Book Corner.
- Budiardjo Miriam. 2007. "Dasar-Dasar Ilmu Politik". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Frans Magnis suseno, 2015, "Etika Politik – Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern",

- Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gabriel A. Almond dalam Basri Seta. "Pengantar Ilmu Politik", Jogjakarta: Indie Book Corner.
- Hardiman, F. B. (2008). "Teori Diskursus dan Demokrasi: Peralihan Habermas ke dalam Filsafat Politik", dalam: Diskursus. "Jurnal Filsafat dan Teologi", 5 (1).
- Hidajat Imam. 2009. "Teori-Teori politik". Malang: Setara press.
- Irwan Abdullah, 2003, "Politik Bhinneka Tunggal Ika dalam Keberagaman Budaya di Indonesia", Jurnal "Masyarakat dan Budaya", Volume 5 No. 2.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Moleong, L. J., 2000, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Peter Merkl dalam Budiardjo Miriam. 2007. "Dasar-Dasar Ilmu Politik", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Saint Augustine, 1945, "The city of God (de civitate dei)", London, Y.M. Dent and Sons, terjemahan Universitas Indonesia
- Samsul Wahidi, 2015, "Dasar – dasar Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan", Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Surbakti Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo.